



Modernisasi Singapura dan Warisan Politik Lee Kuan Yew (1965–1990): Kajian Sejarah Politik

INFO PENULIS

Gita Artika Ningtyas
SMA Negeri 35 Jakarta
Gitaartika406@gmail.com
081294383739

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Ningtyas, G. A. (2026). Modernisasi Singapura dan Warisan Politik Lee Kuan Yew (1965–1990): Kajian Sejarah Politik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1469-1480.

Abstrak

Artikel ini mengkaji proses modernisasi Singapura dan warisan politik Lee Kuan Yew pada periode 1965–1990 dalam perspektif sejarah politik. Setelah berpisah dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan sumber daya alam, tingginya tingkat pengangguran, serta ketidakpastian ekonomi dan politik. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, pemerintah menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi, investasi asing, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta birokrasi yang efisien dan meritokratis. Kebijakan tersebut berhasil mendorong transformasi Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan, industri, dan keuangan terkemuka di Asia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan modernisasi Singapura tidak hanya ditopang oleh kebijakan ekonomi yang efektif, tetapi juga oleh kuatnya peran negara dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan berbagai instrumen politik dan keamanan, termasuk Internal Security Act (ISA), untuk mengendalikan potensi ancaman terhadap stabilitas negara dan pembangunan ekonomi. Kajian ini juga menunjukkan bahwa modernisasi Singapura berlangsung bersamaan dengan penguatan kontrol politik negara terhadap masyarakat. Pemerintahan Lee Kuan Yew membangun legitimasi politik melalui keberhasilan ekonomi, sementara ruang oposisi politik dan kebebasan sipil tetap berada dalam pengawasan negara yang ketat. Oleh karena itu, warisan politik Lee Kuan Yew dapat dipahami sebagai bentuk developmental authoritarianism, yaitu model pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan dominasi negara dalam kehidupan publik. Warisan tersebut masih memengaruhi sistem politik Singapura pasca-1990, terutama dalam kuatnya peran negara, penekanan pada keamanan nasional, serta penggunaan keberhasilan ekonomi sebagai sumber legitimasi politik.

Kata Kunci: Modernisasi, Singapura, Lee Kuan Yew, Developmental State, Developmental Authoritarianism, Sejarah Politik.

Abstract

This article examines the modernization of Singapore and the political legacy of Lee Kuan Yew during the period 1965–1990 from a political history perspective. Following its separation from Malaysia in 1965, Singapore faced numerous challenges, including limited natural resources, high unemployment, and economic and political uncertainty. Under Lee Kuan Yew's leadership, the government implemented development strategies focused on industrialization, foreign investment, infrastructure development, human resource advancement, and an efficient meritocratic bureaucracy. These policies successfully transformed Singapore into one of Asia's leading centers of trade, industry, and finance. This study employs the historical method with a library research approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that Singapore's modernization was supported not only by effective economic policies but also by the strong role of the state in maintaining political stability and national security. In this context, the government utilized various political and security instruments, including the Internal Security Act (ISA), to manage perceived threats to national stability and economic development. The study further reveals that Singapore's modernization proceeded alongside the strengthening of state control over society. The Lee Kuan Yew administration built political legitimacy through economic success, while political opposition and civil liberties remained under strict state supervision. Therefore, Lee Kuan Yew's political legacy can be understood as a form of developmental authoritarianism, a development model that combines economic growth, political stability, and strong state dominance in public life. This legacy continues to influence Singapore's post-1990 political system, particularly through the enduring role of the state, the emphasis on national security, and the use of economic performance as a key source of political legitimacy.

Keywords: Modernization, Singapore, Lee Kuan Yew, Developmental State, Developmental Authoritarianism, Political History.

A. Pendahuluan

Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang kerap dijadikan model keberhasilan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1965, Singapura mampu melakukan transformasi ekonomi dan sosial secara signifikan hingga berkembang menjadi salah satu negara maju di Asia. Keberhasilan tersebut erat kaitannya dengan kepemimpinan Lee Kuan Yew yang memimpin Singapura pada periode 1965–1990. Dalam masa pemerintahannya, negara menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada stabilitas politik, birokrasi yang efisien, industrialisasi, serta keterbukaan terhadap investasi asing. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam proses modernisasi Singapura sekaligus membentuk karakter politik negara yang berpengaruh hingga masa kini. Barr (2000) menjelaskan bahwa Pembangunan Singapura pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew ditopang oleh sistem pemerintahan yang terpusat, birokrasi yang terarah dan disiplin, serta kontrol politik yang kuat terhadap masyarakat dan oposisi politik. Pemerintah menerapkan kebijakan yang menekankan stabilitas nasional, efisiensi administrasi, penegakan hukum yang ketat, dan pengawasan sosial guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Melalui model pemerintahan tersebut, Singapura berhasil berkembang dari negara kecil dengan sumber daya alam terbatas menjadi salah satu pusat perdagangan, keuangan, dan industri modern di kawasan Asia Tenggara.

Di balik keberhasilan modernisasi tersebut, Singapura juga dikenal sebagai negara yang menerapkan kontrol politik secara ketat terhadap masyarakat dan kelompok oposisi. Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah adalah *Internal Security Act* (ISA), yaitu undang-undang keamanan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan penahanan tanpa proses peradilan atas dasar ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam kajiannya, Mauzy & Milne (2002) menjelaskan bahwa ISA berfungsi sebagai instrumen politik yang memungkinkan pemerintah Singapura mempertahankan stabilitas nasional sekaligus memperkuat dominasi negara dalam kehidupan politik masyarakat. Dengan demikian, ISA tidak hanya berfungsi sebagai perangkat keamanan negara, tetapi juga sebagai alat kontrol politik untuk membatasi aktivitas kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Penerapan *Internal Security Act* (ISA) di Singapura tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik era Perang Dingin yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan ideologis antara blok Barat dan komunisme. Pada periode tersebut, pemerintah Singapura memandang gerakan kiri, organisasi buruh, dan kelompok oposisi sebagai ancaman terhadap stabilitas negara yang baru berkembang setelah lepas dari kolonialisme Inggris. Dalam konteks ini, ISA digunakan sebagai instrumen keamanan negara untuk mencegah penyebaran pengaruh komunisme sekaligus menjaga stabilitas politik domestik. Kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah Singapura menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan negara.

Salah satu peristiwa penting dalam penerapan kebijakan tersebut adalah *Operation Coldstore* pada Februari 1963. Operasi ini dilakukan melalui penangkapan massal terhadap lebih dari seratus aktivis politik, tokoh serikat buruh, jurnalis, dan anggota kelompok oposisi yang diduga memiliki hubungan dengan gerakan komunis. Penangkapan dilakukan tanpa proses peradilan dengan menggunakan dasar hukum ISA. Pemerintah Singapura bersama pemerintah kolonial Inggris pada saat itu berpendapat bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah ancaman subversif dan menjaga keamanan nasional menjelang pembentukan Federasi Malaysia.

Namun demikian, sejumlah sejarawan dan akademisi menilai bahwa *Operation Coldstore* tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kepentingan keamanan negara. George (2007) menjelaskan bahwa operasi tersebut juga memiliki dimensi politik karena digunakan oleh pemerintah untuk melemahkan kelompok oposisi kiri yang dianggap dapat menghambat dominasi politik *People's Action Party* (PAP) dalam proses pembentukan negara Singapura modern. Pandangan serupa dikemukakan oleh Barr (2000), yang menyatakan bahwa stabilitas politik pada era Lee Kuan Yew dibangun melalui kombinasi antara pembangunan ekonomi dan penguatan kontrol negara terhadap aktivitas politik masyarakat. Dengan demikian, kebijakan keamanan nasional pada masa tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara kepentingan pembangunan ekonomi dan upaya mempertahankan hegemoni politik pemerintah.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Singapura berhasil menciptakan kondisi politik yang relatif stabil sehingga mendukung proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Stabilitas politik menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat transformasi Singapura menjadi negara industri maju. Akan tetapi, di sisi lain penerapan ISA juga menimbulkan kritik karena dianggap membatasi kebebasan sipil, mempersempit ruang demokrasi, dan melemahkan peran oposisi politik. Oleh sebab itu, *Operation Coldstore* menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Singapura yang menunjukkan bagaimana kebijakan keamanan nasional digunakan tidak hanya untuk menjaga stabilitas negara, tetapi juga untuk mempertahankan dominasi politik pemerintah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam proses modernisasi Singapura. Penulis melihat bahwa di satu sisi, Singapura berhasil membangun citra sebagai negara modern dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sistem administrasi yang efisien, serta kebijakan ekonomi yang terbuka terhadap perdagangan dan investasi asing. Keberhasilan tersebut menjadikan Singapura sering dipandang sebagai representasi negara maju di Asia dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Modernisasi ekonomi yang dijalankan pada era Lee Kuan Yew juga mampu menciptakan stabilitas sosial, mempercepat industrialisasi, dan meningkatkan daya saing Singapura di tingkat global.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat ketidakseimbangan antara modernisasi ekonomi dan perkembangan demokrasi politik. Pemerintah Singapura tetap mempertahankan sistem politik yang cenderung represif melalui pembatasan kebebasan sipil, pengawasan ketat terhadap media massa, serta kontrol terhadap aktivitas politik masyarakat dan kelompok oposisi. Kebijakan seperti *Internal Security Act* (ISA), regulasi pers, dan pembatasan terhadap demonstrasi publik menunjukkan bahwa modernisasi di Singapura tidak sepenuhnya disertai dengan liberalisasi politik. Dalam konteks ini, negara memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur ruang publik dan menjaga stabilitas nasional dengan menekan berbagai potensi konflik politik yang dianggap dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan ketertiban sosial.

Dalam pandangan Rodan (1993), keberhasilan ekonomi Singapura tidak dapat dipisahkan dari model negara otoritarian yang menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Rodan menegaskan bahwa pemerintah Singapura membangun legitimasi kekuasaan melalui keberhasilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara pada saat yang sama negara memperkuat kontrol terhadap partisipasi politik dan kebebasan masyarakat sipil. Dengan demikian, modernisasi Singapura memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi dan praktik otoritarianisme dapat berjalan secara bersamaan dalam

kerangka *developmental state*. Stabilitas politik dijadikan landasan utama untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan, meskipun hal tersebut berdampak pada terbatasnya ruang demokrasi dan kebebasan politik masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji proses modernisasi Singapura pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew (1965–1990) serta menganalisis warisan politik yang ditinggalkannya dalam perspektif sejarah politik. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana keberhasilan pembangunan ekonomi Singapura dibangun melalui kombinasi antara kapasitas negara yang kuat, stabilitas politik, dan kebijakan keamanan nasional yang kemudian membentuk karakter politik Singapura hingga masa kontemporer.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kajian literatur (*library research*) untuk menganalisis hubungan antara modernisasi Singapura dan warisan politik represif pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew. Metode sejarah digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis peristiwa masa lalu, kebijakan politik, serta perkembangan sosial-politik Singapura dalam konteks historis. Menurut Gottschalk & Notosusanto (1986), metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman jejak peninggalan masa lampau guna memperoleh rekonstruksi sejarah yang objektif. Sementara itu, Kuntowijoyo (2013) menjelaskan bahwa penggunaan sumber tertulis dalam penelitian sejarah bertujuan memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama dalam penulisan artikel ini adalah heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber tertulis berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, dokumen arsip, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lain yang berkaitan dengan modernisasi Singapura, kebijakan keamanan nasional, dan penerapan *Internal Security Act* (ISA).

Dokumen arsip yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pidato dan pernyataan resmi pemerintah Singapura yang diperoleh dari National Archives of Singapore (NAS), termasuk *Speech of Singapore's Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew*, serta dokumen resmi *Internal Security Act* 1960 yang diakses melalui *Singapore Statutes Online*. Salah satu arsip utama yang digunakan adalah pidato Lee Kuan Yew dalam pembahasan *Internal Security (Amendment) Bill* tahun 1964. Arsip tersebut memberikan gambaran mengenai pandangan pemerintah Singapura terhadap pentingnya ISA sebagai instrumen dalam menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik. Selain itu, sumber-sumber arsip tersebut juga memberikan informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, pelaksanaan, serta dampak penerapan ISA dalam konteks pembangunan nasional, ketertiban sosial, dan keamanan negara. Sumber utama lainnya adalah artikel akademik karya Damien Cheong yang berjudul *Selling Security: The War on Terrorism and the Internal Security Act of Singapore*. Artikel ini menjelaskan bagaimana pemerintah Singapura membangun narasi keamanan nasional untuk melegitimasi penggunaan ISA, terutama dalam konteks perang melawan terorisme serta upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai kajian terdahulu yang membahas modernisasi Singapura dan karakter otoritarianisme pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew. Salah satunya adalah artikel karya Haig Patapan berjudul *Modern Philosopher Kings: Lee Kuan Yew and the Limits of Confucian "Idealistic" Leadership*. Kajian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi Singapura dibangun melalui kombinasi stabilitas politik, keamanan nasional, disiplin sosial, dan kepemimpinan negara yang kuat.

Melalui berbagai sumber tersebut, penulis memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara proses modernisasi Singapura dan penerapan *Internal Security Act* (ISA) pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew.

Tahap kedua adalah verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian terhadap keaslian, kredibilitas, dan relevansi sumber yang digunakan agar data yang diperoleh bersifat valid dan objektif. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber akademik, serta hasil penelitian terdahulu untuk memastikan konsistensi informasi mengenai kebijakan ISA, modernisasi Singapura, dan praktik politik pada era Lee Kuan Yew.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh. Pada tahap ini, penulis menganalisis hubungan antara modernisasi ekonomi Singapura dengan penguatan kontrol politik negara. Berdasarkan sumber-sumber yang digunakan, kajian ini menafsirkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Singapura tidak

terlepas dari paradigma keamanan nasional yang menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Dalam konteks tersebut, ISA dipandang sebagai instrumen negara untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan nasional, dan keberlangsungan pembangunan ekonomi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa modernisasi Singapura pada era Lee Kuan Yew memperlihatkan kecenderungan pemerintahan yang paternalistik dan otoriter melalui kuatnya kontrol negara terhadap masyarakat dan oposisi politik.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis dan kronologis. Pada tahap ini, seluruh fakta dan hasil analisis disusun menjadi narasi sejarah yang menjelaskan hubungan antara modernisasi Singapura, kebijakan keamanan nasional, dan warisan politik represif pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah politik. Menurut (Sartono Kartodirdjo, 1992), pendekatan sejarah politik tidak hanya menitikberatkan pada peristiwa politik semata, tetapi juga pada relasi kekuasaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa modernisasi Singapura pada era Lee Kuan Yew tidak hanya dibangun melalui kemajuan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan kontrol politik negara terhadap masyarakat.

C. Hasil and Pembahasan

Modernisasi Singapura dalam Era Lee Kuan Yew (1965–1990)

Proses modernisasi Singapura tidak dapat dilepaskan dari kondisi negara setelah berpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Pemisahan tersebut menempatkan Singapura dalam situasi yang rentan secara ekonomi dan politik. Sebagai negara kecil yang minim sumber daya alam, memiliki keterbatasan wilayah, serta bergantung pada perdagangan internasional, Singapura menghadapi berbagai persoalan seperti tingginya pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, dan ketegangan sosial. Kondisi ini mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew untuk merumuskan strategi pembangunan yang berorientasi pada modernisasi ekonomi dan penguatan stabilitas politik sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan negara (*survival state*). Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut, pemerintah menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi berbasis ekspor, perdagangan internasional, dan penarikan investasi asing. Menurut (Low, 2001), kebijakan ini menjadi fondasi utama pembangunan nasional karena Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Melalui keterbukaan ekonomi dan integrasi dengan pasar global, pemerintah berhasil menarik perusahaan multinasional serta mempercepat pertumbuhan sektor industri manufaktur dan jasa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Singapura sejak awal tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi mempertahankan eksistensi negara di tengah persaingan global dan keterbatasan geografis yang dimiliki Singapura (Tan, 2004).

Dalam konteks sejarah politik Singapura, negara diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki peran dominan dalam mengarahkan pembangunan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial-politik masyarakat. Pemerintah meyakini bahwa konflik politik dan instabilitas domestik dapat menghambat pembangunan ekonomi serta mengurangi kepercayaan investor asing terhadap Singapura sebagai pusat perdagangan dan investasi internasional. Oleh karena itu, modernisasi Singapura sejak awal dibangun melalui hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penguatan peran negara dalam mengontrol masyarakat. Menurut Barr (2000), pemerintahan Lee Kuan Yew membangun legitimasi politik melalui keberhasilan ekonomi, efisiensi pemerintahan, dan narasi stabilitas nasional yang menempatkan keamanan negara sebagai prioritas utama pembangunan.

Dalam praktiknya, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan keamanan dan kontrol politik untuk menjaga ketertiban sosial demi mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Paradigma tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi Singapura tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan industrialisasi, tetapi juga dengan bagaimana negara membangun legitimasi kekuasaan melalui stabilitas nasional, keamanan politik, dan pengendalian terhadap kehidupan politik masyarakat. Menurut Rodan (1993), model pembangunan Singapura menunjukkan adanya hubungan erat antara pembangunan ekonomi kapitalis dengan sistem politik yang terpusat dan terkontrol. Dalam perspektif sejarah politik, pengalaman Singapura memperlihatkan bahwa modernisasi negara dapat berlangsung bersamaan dengan penguatan dominasi negara terhadap masyarakat demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam situasi tersebut, Lee Kuan Yew memandang bahwa kelangsungan hidup Singapura hanya dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang cepat disertai stabilitas politik yang kuat. Sebagai negara kecil yang miskin sumber daya alam dan sangat bergantung pada perdagangan internasional, Singapura menghadapi tantangan besar setelah berpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi, perdagangan internasional, dan penarikan investasi asing sebagai fondasi utama modernisasi negara (Low, 2001). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi Singapura tidak semata-mata bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi strategi politik untuk mempertahankan eksistensi negara (*survival state*) di tengah keterbatasan geografis dan ekonomi yang dimiliki Singapura (Tan, 2004). Lebih jauh, pemerintah Singapura menempatkan stabilitas sosial dan keamanan nasional sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan negara. Dalam pandangan Lee Kuan Yew, konflik politik, ketegangan sosial, dan instabilitas domestik dapat menghambat masuknya investasi asing serta melemahkan posisi Singapura dalam persaingan ekonomi global. Sebagai negara yang bergantung pada modal asing dan perdagangan internasional, Singapura memerlukan kondisi politik yang stabil agar proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, modernisasi Singapura sejak awal tidak hanya diarahkan pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi, tetapi juga disertai dengan penguatan kontrol politik negara terhadap masyarakat (Barr, 2000).

Dalam konteks tersebut, pemerintah memandang bahwa keamanan nasional dan stabilitas politik merupakan syarat utama untuk menjaga kepercayaan investor asing dan menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Cheong (2008), paradigma keamanan nasional Singapura dibangun berdasarkan asumsi bahwa ancaman terhadap stabilitas politik dapat berdampak langsung terhadap keamanan ekonomi negara. Oleh karena itu, negara menerapkan berbagai kebijakan keamanan dan kontrol politik untuk menjaga ketertiban sosial demi mendukung agenda modernisasi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses modernisasi Singapura dibangun melalui hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penguatan kekuasaan negara terhadap masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ketertiban sosial dan keamanan nasional yang dianggap penting untuk menjaga kepercayaan investor, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mempertahankan keberlangsungan negara di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki Singapura. Yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah terciptanya kondisi politik yang stabil, keamanan sosial yang terjaga, meningkatnya kepercayaan investor asing, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta terbentuknya negara modern yang mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah Singapura meyakini bahwa investasi asing hanya akan masuk apabila negara berada dalam kondisi aman dan stabil. Oleh karena itu, kontrol politik terhadap masyarakat dipandang sebagai cara untuk mencegah munculnya konflik politik, gerakan oposisi radikal, maupun ketidakstabilan sosial yang dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga berharap bahwa modernisasi yang didukung oleh stabilitas politik akan mempercepat transformasi Singapura dari negara kecil yang miskin sumber daya menjadi pusat perdagangan, industri, dan keuangan internasional. Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi mempertahankan keberlangsungan negara (*survival state*) di tengah persaingan global dan keterbatasan geografis Singapura (Tan, 2004). Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan ekonomi hanya dapat dicapai apabila negara mampu menciptakan kondisi politik yang stabil, aman, dan kondusif bagi perdagangan internasional serta investasi asing (Low, 2001). Oleh karena itu, penguatan kontrol politik yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata bertujuan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dipandang sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial demi mendukung agenda modernisasi dan pembangunan nasional. Dalam pandangan pemerintahan Lee Kuan Yew, stabilitas politik merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi karena konflik sosial dan instabilitas domestik dapat menghambat investasi asing dan melemahkan daya saing ekonomi Singapura di tingkat global (Barr, 2000). Dengan demikian, modernisasi Singapura memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi, keamanan nasional, dan penguatan peran negara dalam mengontrol kehidupan politik masyarakat (Cheong, 2008).

Pemerintah Singapura juga melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif sebagai fondasi utama dalam mendukung modernisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan tersebut mencakup pengembangan pelabuhan internasional, kawasan industri, sistem transportasi terpadu, perumahan rakyat, serta sektor pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja industri modern (Jenifer, 2023). Infrastruktur dipandang tidak

hanya sebagai sarana pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat konektivitas nasional, menarik investasi asing, dan meningkatkan daya saing global Singapura (Agustanta et al., 2024). Kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara negara, industri, dan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting keberhasilan transformasi ekonomi Singapura dari negara kecil dengan sumber daya terbatas menjadi pusat perdagangan dan jasa internasional (Mubarok et al., 2024).

Menurut Linda Low (2001), strategi pembangunan Singapura berfokus pada integrasi ekonomi global dan penguatan peran negara dalam mengelola pembangunan nasional secara terencana dan efisien. Di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew, negara secara aktif mengarahkan pembangunan nasional agar terintegrasi dengan sistem ekonomi internasional. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada perdagangan bebas, industrialisasi berbasis ekspor, dan penarikan investasi asing sebagai strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan karena Singapura menyadari bahwa keterbatasan sumber daya alam dan luas wilayah membuat negara ini sangat bergantung pada perdagangan internasional serta arus modal asing untuk mempertahankan keberlangsungan ekonominya. Melalui kebijakan ekonomi yang terbuka terhadap pasar global, Singapura berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, industri, dan keuangan internasional di Asia Tenggara. Posisi geografis Singapura yang strategis di jalur perdagangan dunia dimanfaatkan secara maksimal melalui modernisasi pelabuhan, pembangunan infrastruktur logistik, dan pengembangan sektor jasa keuangan internasional. Pemerintah juga menciptakan iklim investasi yang stabil melalui efisiensi birokrasi, rendahnya tingkat korupsi, serta jaminan keamanan bagi investor asing. Peran negara dalam mengelola pembangunan nasional secara terencana dan efisien.

Selain itu, Lee Kuan Yew berpendapat bahwa keberhasilan ekonomi Singapura hanya dapat dicapai apabila negara mampu menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial. Dalam pandangan pemerintah, stabilitas nasional merupakan syarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang aman dan kondusif bagi pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi di Singapura tidak hanya dijalankan melalui liberalisasi ekonomi dan keterbukaan terhadap pasar global, tetapi juga melalui penguatan kontrol politik negara demi menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, modernisasi Singapura memperlihatkan bagaimana negara memainkan peran dominan dalam mengarahkan pembangunan ekonomi sekaligus mengendalikan kehidupan politik masyarakat.

Pemerintah Singapura juga menyadari bahwa keterbatasan sumber daya alam mengharuskan negara bergantung pada kualitas sumber daya manusia, efisiensi birokrasi, dan kemampuan ekonomi berbasis teknologi. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta penguasaan teknologi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi dan mendukung daya saing ekonomi global. Pemerintah secara aktif mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan pasar kerja guna menciptakan tenaga kerja yang disiplin, terampil, dan produktif (Low, 2001). Selain itu, negara menerapkan birokrasi yang efisien dan meritokratis sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mauzy & Milne, 2002).

Strategi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi Singapura dibangun melalui perencanaan negara yang terpusat, terorganisasi secara ketat, dan berorientasi pada efisiensi pembangunan. Dalam konteks ini, negara memainkan peran dominan sebagai aktor utama yang mengarahkan kebijakan ekonomi, pembangunan industri, serta pengelolaan sumber daya manusia demi mendukung agenda modernisasi nasional. Menurut Rodan (1993), keberhasilan pembangunan Singapura tidak terlepas dari kuatnya kapasitas negara dalam mengontrol arah pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas politik domestik. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan Singapura tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi yang terbuka terhadap pasar global, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengendalikan arah pembangunan dan menciptakan stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Keberhasilan modernisasi Singapura pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari paradigma negara yang menempatkan stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai prioritas utama. Pemerintah memandang bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai apabila kondisi sosial dan politik negara berada dalam keadaan stabil dan terkendali. Oleh sebab itu, negara menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan kontrol yang kuat terhadap masyarakat demi menjaga ketertiban sosial dan keamanan nasional. Dalam konteks sejarah politik, modernisasi Singapura tidak hanya dipahami sebagai proses pembangunan ekonomi dan

infrastruktur, tetapi juga sebagai proses pembentukan negara modern yang terorganisasi, disiplin, efisien, dan memiliki kontrol politik yang kuat terhadap kehidupan masyarakat.

Stabilitas Politik dan Penguatan Peran Negara

Dalam proses modernisasi Singapura pada periode 1965–1990, pemerintahan Lee Kuan Yew menempatkan stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai fondasi utama pembangunan negara. Setelah berpisah dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya alam, tingginya tingkat pengangguran, ketidakpastian ekonomi, serta kerentanan terhadap konflik sosial dan politik. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengadopsi konsep *survival state*, yakni pandangan bahwa keberlangsungan negara hanya dapat dijamin melalui pembangunan ekonomi yang cepat dan stabilitas politik yang kuat. Dalam kerangka tersebut, keamanan nasional dipandang sebagai bagian integral dari agenda modernisasi. Pemerintah meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berjalan efektif apabila negara berada dalam kondisi instabilitas politik, konflik sosial, atau ancaman ideologis yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan keamanan diterapkan untuk menjaga stabilitas nasional, salah satunya melalui pemberlakuan *Internal Security Act (ISA)*, yang menjadi instrumen penting dalam mendukung keamanan politik sekaligus keberlangsungan pembangunan ekonomi. (Antriksa, 2014). *Internal Security Act (ISA)* memberikan kewenangan kepada pemerintah Singapura untuk melakukan penahanan tanpa proses pengadilan terhadap individu atau kelompok yang dianggap mengancam keamanan nasional. Pada awal penerapannya, ISA digunakan untuk menghadapi pengaruh komunisme, gerakan kiri, dan aktivitas politik radikal yang berkembang pada masa awal kemerdekaan Singapura. Pemerintah menilai bahwa berkembangnya ideologi komunis dan gerakan oposisi yang bersifat radikal dapat memicu instabilitas politik serta menghambat agenda pembangunan nasional dan modernisasi ekonomi negara (Wibowo, 2018). Dalam perspektif politik pembangunan, kebijakan keamanan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi negara untuk menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penguatan legitimasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew (Rahman, 2021).

Pemerintah Singapura beranggapan bahwa konflik politik dan ketidakstabilan domestik dapat menurunkan kepercayaan investor asing, menghambat arus perdagangan internasional, serta melemahkan daya saing ekonomi Singapura di tingkat global. Oleh sebab itu, ISA diposisikan sebagai instrumen preventif negara untuk menjaga stabilitas politik dan menciptakan kondisi yang dianggap kondusif bagi pembangunan ekonomi nasional. Argumentasi tersebut sejalan dengan paradigma keamanan nasional Singapura yang menempatkan stabilitas politik sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Damien Cheong dalam artikelnya *Selling Security: The War on Terrorism and the Internal Security Act of Singapore* menjelaskan bahwa pemerintah Singapura membangun narasi keamanan nasional untuk melegitimasi penggunaan ISA sebagai alat mempertahankan stabilitas negara dan keberlangsungan pembangunan ekonomi (Cheong, 2008).

Selain itu, Michael D. Barr menjelaskan bahwa pemerintahan Lee Kuan Yew menggunakan isu keamanan nasional dan ancaman komunisme sebagai dasar legitimasi untuk memperkuat kontrol negara terhadap masyarakat sekaligus menjaga stabilitas politik yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi (Barr, 2000). Dalam pandangan pemerintah Singapura, stabilitas politik merupakan syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik bagi modal asing. Oleh karena itu, kebijakan keamanan seperti ISA dipandang sebagai instrumen penting untuk mencegah munculnya konflik politik dan gerakan oposisi yang dianggap dapat mengganggu pembangunan nasional. Barr menegaskan bahwa model pemerintahan Lee Kuan Yew berupaya menggabungkan pembangunan ekonomi kapitalis dengan sistem politik yang terkontrol dan cenderung *illiberal* (Barr, 2000). Menurutnya, pemerintahan Singapura membangun legitimasi politik melalui keberhasilan ekonomi, efisiensi pemerintahan, dan narasi stabilitas nasional, sementara pada saat yang sama membatasi ruang oposisi politik demi menjaga ketertiban sosial dan keberlangsungan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, ISA dipandang sebagai instrumen preventif yang memungkinkan negara bertindak cepat sebelum ancaman berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pemerintah meyakini bahwa negara kecil seperti Singapura tidak memiliki banyak ruang untuk menghadapi gejolak politik berkepanjangan karena kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, keamanan nasional ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi modernisasi negara. Namun, di sisi lain, penerapan ISA juga menunjukkan kuatnya kontrol politik negara terhadap masyarakat. Kewenangan penahanan

tanpa proses peradilan menimbulkan kritik karena dianggap membatasi kebebasan sipil, mempersempit ruang oposisi politik, dan memperkuat karakter pemerintahan yang cenderung otoriter. Dengan demikian, modernisasi Singapura pada masa Lee Kuan Yew memperlihatkan adanya hubungan erat antara pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penggunaan kebijakan represif negara dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

Warisan Politik Lee Kuan Yew dalam Perspektif Sejarah Politik

Keberhasilan transformasi Singapura menjadi negara maju tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan yang diterapkan oleh Lee Kuan Yew selama masa pemerintahannya (1965–1990). Dalam perspektif sejarah politik, warisan terpenting yang ditinggalkannya bukan hanya kemajuan ekonomi, tetapi juga terbentuknya sistem politik yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengarahkan pembangunan nasional. Model ini dikenal sebagai *developmental state*, yaitu negara yang memiliki kapasitas birokrasi kuat, perencanaan pembangunan yang terpusat, serta kemampuan mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan politik untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Melalui model tersebut, pemerintah berhasil mendorong industrialisasi, menarik investasi asing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dan keuangan internasional (Low, 2001).

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan kontrol politik negara. Dalam praktiknya, pemerintahan Lee Kuan Yew mengembangkan pola *developmental authoritarianism*, yaitu model pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan sistem politik yang terkontrol. Pemerintah menempatkan stabilitas politik, keamanan nasional, dan ketertiban sosial sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan. Dalam pandangan pemerintah, kebebasan politik yang terlalu luas berpotensi menimbulkan konflik sosial dan instabilitas yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara memainkan peran dominan dalam mengatur kehidupan politik dan sosial masyarakat (Barr, 2000).

Konsekuensi dari model tersebut adalah terbatasnya ruang oposisi politik dan kebebasan sipil. Pemerintah menerapkan berbagai regulasi yang memungkinkan pengawasan terhadap media massa, pembatasan aktivitas kelompok oposisi, serta pengendalian terhadap mobilisasi politik masyarakat. Selain itu, penggunaan *Internal Security Act (ISA)* memperkuat posisi negara dalam menghadapi kelompok yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Menurut Patapan (2001), pengalaman Singapura menunjukkan bahwa modernisasi ekonomi berlangsung beriringan dengan praktik pemerintahan yang paternalistik dan cenderung otoriter. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi, efisiensi birokrasi, dan kemajuan infrastruktur, tetapi juga oleh kuatnya peran negara dalam mengatur kehidupan politik dan sosial demi menjaga stabilitas nasional. Dalam perspektif ini, negara diposisikan sebagai aktor utama yang mengarahkan pembangunan sekaligus mengendalikan berbagai potensi yang dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keberlangsungan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Singapura memandang stabilitas sosial dan keamanan nasional sebagai prasyarat utama bagi keberhasilan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara beranggapan bahwa kebebasan politik yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan konflik sosial, polarisasi politik, dan instabilitas yang dapat menghambat agenda pembangunan nasional (Barr, 2000).

Pandangan ini menjadi dasar bagi penguatan peran negara dalam mengelola kehidupan politik sekaligus mempertahankan stabilitas yang dianggap penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi. Menurut George (2007), pemerintah Singapura menerapkan bentuk *calibrated coercion*, yaitu penggunaan kontrol politik dan tekanan negara secara terukur untuk mempertahankan dominasi politik tanpa menciptakan ketidakstabilan yang besar di masyarakat. Strategi ini memungkinkan pemerintah menjaga legitimasi politik melalui keberhasilan ekonomi sekaligus membatasi ruang kritik terhadap negara.

Selain itu, penggunaan kebijakan keamanan seperti *Internal Security Act (ISA)* menunjukkan bahwa negara memiliki peran dominan dalam mengendalikan kehidupan politik masyarakat. Pemerintah memanfaatkan paradigma keamanan nasional untuk melegitimasi pembatasan terhadap oposisi politik dan kebebasan sipil demi menjaga stabilitas pembangunan ekonomi (Cheong, 2008). Kondisi tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang paternalistik dan cenderung otoriter, di mana negara memosisikan diri sebagai aktor utama yang menentukan arah pembangunan sekaligus mengontrol ruang politik masyarakat.

Dengan demikian, modernisasi Singapura pada masa Lee Kuan Yew menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya berjalan seiring dengan liberalisasi politik. Sebaliknya, pembangunan negara modern di Singapura justru dibangun melalui kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan penguatan kontrol politik negara terhadap masyarakat demi mempertahankan stabilitas nasional.

Modernisasi Singapura pada akhirnya memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi dan praktik otoritarianisme berjalan seiring. Di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew, negara berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas sosial, birokrasi yang efisien, serta pembangunan infrastruktur yang modern. Namun, keberhasilan tersebut dibangun melalui sistem politik yang sangat terkontrol, di mana negara memiliki peran dominan dalam mengatur kehidupan politik dan sosial masyarakat. Pemerintah meyakini bahwa negara kecil seperti Singapura tidak memiliki banyak ruang untuk menghadapi konflik politik maupun instabilitas domestik karena kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan investasi asing (Low, 2001). Oleh sebab itu, stabilitas politik dijadikan prioritas utama dalam proses modernisasi, bahkan apabila harus mengorbankan sebagian kebebasan politik dan hak sipil masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan berbagai instrumen politik dan keamanan untuk mempertahankan stabilitas nasional, termasuk pengawasan media, pembatasan aktivitas oposisi politik, serta penerapan Internal Security Act (ISA) yang memungkinkan penahanan tanpa proses pengadilan. Menurut Barr (2000), pemerintahan Lee Kuan Yew membangun legitimasi kekuasaan melalui keberhasilan ekonomi dan narasi keamanan nasional, sehingga kontrol politik terhadap masyarakat dipandang sebagai langkah yang diperlukan demi menjaga ketertiban sosial dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, modernisasi Singapura menunjukkan karakter *developmental authoritarianism*, yaitu model pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi kapitalis dengan sistem politik yang cenderung otoriter. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan batas-batas kebebasan politik masyarakat. Menurut George (2007), pemerintah Singapura menerapkan pola *calibrated coercion*, yaitu penggunaan kontrol politik secara terukur untuk mempertahankan stabilitas dan dominasi negara tanpa menimbulkan gejolak sosial yang signifikan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah mampu menjaga legitimasi politik yang bersumber dari keberhasilan pembangunan ekonomi sekaligus membatasi ruang kritik dan oposisi terhadap negara. Dalam praktiknya, penguatan kontrol politik dilakukan melalui berbagai regulasi keamanan, pengawasan media massa, serta pembatasan aktivitas politik yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.

Dalam perspektif sejarah politik, warisan politik Lee Kuan Yew menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Singapura tidak sepenuhnya diikuti oleh liberalisasi politik yang luas. Sebaliknya, pembangunan negara modern dibangun melalui hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan penguatan peran negara dalam mengelola kehidupan masyarakat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga ketertiban sosial melalui berbagai kebijakan politik dan keamanan.

Pengalaman Singapura memperlihatkan bahwa proses modernisasi dapat berlangsung dalam sistem politik yang terpusat dan terkontrol. Dalam model tersebut, stabilitas nasional ditempatkan sebagai prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi, sehingga negara memiliki legitimasi yang kuat untuk mengatur ruang politik dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, warisan politik Lee Kuan Yew dapat dipahami sebagai perpaduan antara *developmental state* dan *developmental authoritarianism*, yaitu model pembangunan yang menekankan efisiensi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik sebagai fondasi utama negara.

Warisan tersebut tetap memengaruhi sistem politik Singapura pasca-1990. Kuatnya peran negara, dominasi politik yang relatif stabil, serta penekanan berkelanjutan pada keamanan nasional, efektivitas birokrasi, dan pembangunan ekonomi menunjukkan keberlanjutan prinsip-prinsip politik yang dibangun pada era Lee Kuan Yew. Dengan demikian, warisan politiknya tidak hanya tercermin dalam keberhasilan transformasi ekonomi Singapura, tetapi juga dalam terbentuknya sistem politik yang menempatkan stabilitas dan pembangunan sebagai sumber utama legitimasi negara.

D. Kesimpulan

Modernisasi Singapura pada periode 1965–1990 menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan negara tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh

kemampuan negara dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Setelah berpisah dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya alam, tingginya tingkat pengangguran, serta ketidakpastian ekonomi dan politik. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, pemerintah merespons kondisi tersebut melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi, perdagangan internasional, investasi asing, pengembangan sumber daya manusia, dan efisiensi birokrasi. Kebijakan tersebut berhasil mendorong transformasi Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan, industri, dan keuangan terkemuka di Asia.

Keberhasilan modernisasi tersebut tidak terlepas dari kuatnya peran negara dalam mengarahkan pembangunan dan menjaga stabilitas nasional. Dalam kerangka developmental state, pemerintah menempatkan stabilitas politik sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan keamanan, termasuk Internal Security Act (ISA), digunakan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah ancaman yang dianggap dapat menghambat pembangunan. Namun, penerapan kebijakan tersebut juga memperlihatkan adanya penguatan kontrol negara terhadap kehidupan politik masyarakat, termasuk pembatasan terhadap oposisi politik dan kebebasan sipil.

Dalam perspektif sejarah politik, pengalaman Singapura menunjukkan bahwa modernisasi ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan praktik developmental authoritarianism. Keberhasilan pembangunan dicapai melalui kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang pesat, birokrasi yang efisien, stabilitas politik yang kuat, serta dominasi negara dalam mengelola kehidupan politik dan sosial. Dengan demikian, modernisasi Singapura tidak sepenuhnya diikuti oleh liberalisasi politik yang luas, melainkan berkembang dalam sistem politik yang terpusat dan terkontrol.

Oleh karena itu, warisan politik Lee Kuan Yew tidak hanya tercermin dalam keberhasilan transformasi ekonomi Singapura, tetapi juga dalam terbentuknya sistem politik yang menempatkan stabilitas nasional, efektivitas pemerintahan, dan pembangunan ekonomi sebagai sumber utama legitimasi negara. Warisan tersebut terus memengaruhi dinamika politik Singapura pasca-1990 dan menjadi salah satu karakteristik utama dalam perkembangan negara tersebut hingga saat ini.

E. Referensi

- Agustanta, N., Oktafiona, A., Nur'aini, N. H., & Al Ghifari, J. (2024). Analisis dampak strategi pengembangan ekonomi: Studi kasus Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2).
- Antriksa, F. A. (2014). Demokrasi semu di Singapura pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew (1959–1990). *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(2), 1–15.
- Barr, M. D. (2000). *Lee Kuan Yew: The beliefs behind the man*. Georgetown University Press.
- Cheong, D. (2008). Selling security: The war on terrorism and the Internal Security Act of Singapore. *Contemporary Southeast Asia*, 30(1), 1–25. <https://doi.org/10.1355/cs30-1a>
- George, C. (2007). Consolidating authoritarian rule: Calibrated coercion in Singapore. *The Pacific Review*, 20(2), 127–145. <https://doi.org/10.1080/09512740701364050>
- Gottschalk, L., & Notosusanto, N. (1986). *Mengerti sejarah*. UI Press.
- Jenifer. (2023). Penerapan model state capitalism sebagai strategi pembangunan ekonomi Singapura. *Jurnal Sentris*, 5(1), 14–33. <https://doi.org/10.26593/sentris.v5i1.7621.14-33>
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Low, L. (2001). *The political economy of a city-state: Government-made Singapore*. Oxford University Press.
- Mauzy, D. K., & Milne, R. S. (2002). *Singapore politics under the People's Action Party*. Routledge.
- Mubarok, A. G. A., Putri C, D. A., Santika, N., & Saragi, C. S. D. B. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Singapura. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.825>
- Patapan, H. (2001). Modern philosopher kings: Lee Kuan Yew and the limits of Confucian "idealistic" leadership. *Thesis Eleven*, 67(1), 1–23. <https://doi.org/10.1177/0725513601067001002>
- Rahman, M. F. (2021). Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi Singapura pada masa Lee Kuan Yew. *Jurnal Historica*, 5(2), 87–98.
- Rodan, G. (1993). *Singapore changes guard: Social, political and economic directions in the 1990s*.

St. Martin's Press.

- Tan, K. P. (2004). The ideology of pragmatism: Neo-liberal globalisation and political authoritarianism in Singapore. *Journal of Contemporary Asia*, 34(1), 67-92. <https://doi.org/10.1080/00472330480000081>
- Wibowo, A. (2018). Politik keamanan Singapura dan penerapan Internal Security Act dalam menjaga stabilitas negara. *Jurnal Kajian Sejarah Dan Politik*, 3(1), 45-57.